

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan tentang peranan pemerintah dalam bidang pengawasan industri khususnya yang dihasilkan dari perkebunan, misalnya karet, sangat tidak asing lagi bagi kehidupan sosial. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi serta pengawasan terhadap perindustrian dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Peran atau peraturan-peraturan yang penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan dan pengawasan terutama bagi PT maupun perusahaan yang bergerak dibidangnya masing-masing.¹

Pengaturan Perundang-undangan industri No 28 Tahun 2008 tentang pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkuat ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas.²

Melihat implementasi salah satu PT yang bergerak di bidang industri karet yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan hasil tanaman dan produksi industri serta perdagangan hasil industri. Salah satu bidang usaha perusahaan adalah bergerak dalam bidang pengelolaan karet.

Untuk mencapai tujuan pokoknya yaitu mendapatkan laba yang maksimum maka perlu dilakukan perencanaan dan pengawasan biaya produksi karet yang baik dan tepat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan masalah perencanaan dan pengawasan biaya produksi serta limbah dalam lingkungan pabrik pada PT DJAMBI WARAS Provinsi Jambi.³

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan pengawasan pengelolaan industri daerah pedesaan melalui pengembangan perkebunan karet rakyat.

Hal ini cukup beralasan, karena sejak tahun 1967 samapi 2004 luas areal, produksi dan produktivitas karet-rakyat di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu masing-masing 2,34 juta ha/tahun, 0,85 juta ton/tahun dan 3,55 kw/ha/tahun dengan laju peningkatan masing-masing 1,49; 3,06 dan 1,56 persen/tahun (Dirjen Bina Produksi Perkebunan, 2004). Perkebunan karet-rakyat di Propinsi Jambi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Umumnya diusahakan oleh petani dalam skala kecil (sempit) dengan sistem tradisional. Berbeda dengan yang diusahakan oleh perusahaan pemerintah/swasta, dimana pengusahaannya dilakukan dalam skala besar dengan sistem teknologi modern. Namun demikian, dilihat dari

³ Dirjen Perkebunan, 2004. Statistik Perkebunan Karet Indonesia 2002-2004. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.

proporsi luasan, kebun karet-rakyat tetap mendominasi, sehingga usaha itu patut diperhitungkan, karena dapat menentukan dinamika perkaretan Indonesia.⁴

Mengenai pengelolaan yang akan diawasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah, yaitu hanya sekitar 5,49 kw/ha/th; disamping kualitas hasil olahan-karet juga tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah faktor pemilikan teknologi dan kemampuan sumberdaya petani masih rendah, sehingga sampai di pasaran, produk karet Indonesia dikenal sebagai yang bermutu rendah. Sementara produk karet dari negara *jiran*, seperti Thailand dan Malaysia tetap mampu menjaga kualitas karetnya, sehingga sampai sekarang masih menguasai pasaran karet dunia.

Melihat bahwa produksi karet Indonesia telah berhasil mencapai kejayaan, karena menjadi produsen karet-alam terbesar di Dunia. Kemudian, meski setelah itu ada istilah harga karet alam dunia yang cukup tinggi, namun *booming* harga karet tersebut hanya mampu meningkatkan jumlah areal kebun karet-rakyat saja dan belum mampu meningkatkan kualitasnya. Karenanya data dari Dirjen Perkebunan (2001) menunjukkan, posisi Indonesia sejak 1990 hingga tahun 2000 tetap berada di posisi kedua setelah Thailand sebagai produsen karet-alam dunia. Hal ini juga akan mempengaruhi pabrik PT yang mengelolah karet yang akan mengakibatkan banyaknya limbah yang mempengaruhi lingkungan hidup masyarakat. Maka dalam prosesnya akan

⁴ F. H. D. 1993. *The Rubber Industry in Indonesia*. Singapore: Pustaka.

mempengaruhi peran pengawasan pemerintah untuk program-program pengembangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang industri karet.⁵

Argumen di atas menunjukkan dengan banyaknya produksi karet di Indonesia serta pengelolaan pada pabrik PT yang jelas akan membawa dampak serta mengakibatkan pencemaran lingkungan terhadap masyarakat.

Dengan fenomena tersebut, maka posisi pemerintah akan mendapat peran yang sangat besar dalam pengawasan serta pemantauan di lingkungan industri karet khususnya mengenai pencemaran limbah dari pabrik PT DJAMBI WARAS Provinsi Jambi.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan proses penelitian mengenai: PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PABRIK PT DJAMBI WARAS PROVINSI JAMBI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap limbah industri karet oleh PT. DJAMBI WARAS Provinsi Jambi?
2. Apakah yang menjadi hambatan pemerintah dalam pengawasan terhadap limbah industri karet oleh PT. Djambi Waras Provinsi

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan terhadap limbah industri karet oleh PT. DJAMBI WARAS Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pengawasan pemerintah terhadap limbah industri karet oleh PT. Djambi Waras Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi disebuah Perusahaan/PT yang terkait dibawah pengawasan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan limbah industri karet